

Warga Cianjur Keluhkan Penyaluran Bansos Lewat e-Warong Diduga Fiktif

CIANJUR (IM)- Dugaan penyimpangan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) kembali muncul di Cianjur. Sejumlah e-Warong di Kecamatan Bojongpicung melakukan penggesekan dan menarik dana dari kartu penerima BPNT, namun belum memberikan komoditas pangan. Iwa Kartiwa, warga Kecamatan Bojongpicung, mengatakan awalnya sejumlah penerima BPNT di Desa Sukajaya mengeluhkan terkait prosedur penyaluran yang berbeda dari biasanya.

Jika sebelumnya penerima BPNT melakukan penggesekan kartu dan langsung menerima sembako sesuai nilai yang diterima, tetapi kali ini kartu milik penerima digesek dan ditarik uangnya tetapi sembako diterima beberapa hari kemudian. "Kalau sesuai Pedoman Umum (Pedum), penggesekan itu sekaligus transaksi penukaran dengan sembako. Jadi transaksi dilakukan saat itu juga. Tapi ternyata malah digesek dulu kartunya, uangnya ditarik tapi sembakonya nanti. Bahkan kemarin juga warga melaporkan jika sudah dilakukan transaksi penarikan uang di e-Warong, tapi sembakonya belum menerima," ujar dia, Senin (1/11).

Menurutnya kondisi tersebut terjadi sejak awal 2021. Bahkan tak hanya di Desa Sukajaya, hak serupa juga terjadi di dua desa lain di Kecamatan Bojongpicung, yakni Desa Neglasari dan Desa Sukarama. "Untuk yang sudah mendapatkan bukti penyimpangan ada di Desa Neglasari dan Sukajaya. Dan itu sudah dicek langsung oleh anggota DPRD, yang sidak ke lokasi beberapa hari lalu," ujar Iwa.

Menurut dia, seharusnya e-Warong sebagai penyalur harus sudah menyediakan komoditas

sesuai kebutuhan masyarakat penerima BPNT. "Kalau polanya seperti itu, tukang tambah ban juga bisa jadi e-Warong. Tinggal tarik dana dulu kemudian dibelanjakan, setelah belanja pakai uang yang ditarik langsung disalurkan. Aturannya kan tidak seperti itu," kata dia.

Iwa menegaskan e-Warong tersebut harus diproses lebih lanjut oleh pihak terkait, sebab penyaluran tak sesuai dengan aturan. "Harus diproses, sudah jelas menyalahi aturan penyaluran BPNT. Dan terjadi bukan hanya di satu e-Warong. Tapi di beberapa e-Warong dan di beberapa desa," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi membenarkan temuan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Bojongpicung. Menurutnya, DPRD sudah melakukan sidak ke lokasi untuk memastikan dugaan penyimpangan tersebut. "Kita sudah sidak ke tiga e-Warong di Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung dan kondisinya memang seperti itu. Uang ditarik dulu, kemudian komoditas sembakonya diserahkan beberapa hari setelahnya," kata dia.

Menurutnya pihak e-Warong beralasan jika uang yang ditarik tersebut ditabungkan oleh penerima pada e-Warong sebelum sembako hingga komoditas sembako tersedia. "Ini kan alasan yang aneh, di wilayah lain tetap berjalan normal, tidak seperti itu alurnya. Dan ini terjadi di beberapa e-Warong di wilayah tersebut. Kan jadi tanda tanya besar. Makanya kami minta dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata dia. ● **pur**

Banjir di Pameungpeuk Garut Disebabkan Hutan Gundul

GARUT (IM)- Curah hujan tinggi di Kabupaten Garut membuat Sungai Cipaleh di Kecamatan Pameungpeuk meluap ke permukiman warga pada pekan lalu. Setidaknya, puluhan rumah terdampak akibat banjir itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, meluapnya Sungai Cipaleh diduga diakibatkan oleh curah hujan tinggi yang terjadi pada hari Rabu (27/10). Namun, selain curah hujan yang tinggi, luapan sungai juga diakibatkan adanya gunung gundul, khususnya Gunung Kasur.

"Meluapnya Sungai Cipaleh ini mengakibatkan runtuhnya tembok penahan tebing (TPI), tergeculnya sebuah bangunan yang berada dipinggir sungai, dan 21 rumah terendam setinggi 70 sentimeter (cm) selama 2 jam, sehingga menyebabkan beberapa sebagian penobatan rumah tangga mengalami kerusakan," kata dia, Senin (1/11).

Ya menerangkan, ada beberapa upaya yang harus dilakukan di antaranya reboisasi di wilayah sungai. Upaya yang mesti dilakukan adalah normalisasi

sungai dengan cara melakukan pengerukan sedimen sungai dan mempertinggi TPI Sungai Cipaleh sepanjang 250 meter yang ada di wilayah Leuwisemar.

Ihwal warga terdampak banjir, Nurdin mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah menyerahkan bantuan, khususnya bagi warga Kampung Leuwisimar dan Leuwipu, Desa Mandalakasih, Kecamatan Pameungpeuk. Bantuan yang dibenkan berupa beras, selimut, perlengkapan mandi, mie instan, dan air mineral.

Sebelumnya, puluhan rumah di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, terendam banjir akibat luapan Sungai Cipaleh pada Rabu (27/10). Satu rumah warga yang berada di tepi sungai itu juga ikut terbawa air. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Satria Budi mengatakan, luapan Sungai Cipaleh itu terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang turun pada Rabu sore. Luapan air dari Sungai Cipaleh naik ke permukiman warga mencapai 50 sentimeter. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENGURANGAN JUMLAH ANGKOT DI KOTA BOGOR

Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) menyaksikan penghancuran mobil angkutan kota (angkot) di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (1/11). Pemerintah Kota Bogor mengurangi secara bertahap operasional 147 angkot yang fungsinya digantikan oleh 49 Bus Kita Trans Pakuan dari program Buy The Service (BTS) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

VAKSINASI COVID-19 SUDAH 50 PERSEN

Kabupaten Bogor Menanti Kejelasan Status PPKM

Kami tinggal menunggu penurunan status PPKM dari level 3 ke level 2 dari pemerintah pusat. Ade Yasin optimistis level PPKM bisa menyamai Kota Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta dan lainnya karena angka kematian pasien Covid-19 ada di angka nol.

CIBINONG (IM)- Presentase vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah mencapai 50 persen. Saat ini tinggal menunggu instruksi pemerintah pusat untuk menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari level 3 ke level 2.

"Insya Allah hari ini presentase vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah mencapai 50 persen. Kami tinggal

menunggu penurunan status PPKM dari level 3 ke level 2 dari pemerintah pusat," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Ade Yasin usai menghadiri Muscab IX Gapensi Kabupaten Bogor, Senin (1/11).

Bupati Bogor itu menambahkan, selain presentase vaksinasi Covid-19 yang sudah melebihi angka 2,4 juta jiwa dari target 4,2 juta jiwa, bed occupancy rate (BOR) rumah

sakit pasien Covid-19 di bawah 5 persen.

Selain itu, Ade Yasin optimistis level PPKM bisa menyamai Kota Bogor, Kota Depok, DKI Jakarta dan lainnya karena angka kematian pasien Covid-19 ada di angka nol.

Agar angka penyebaran wabah Covid-19 tidak meningkat lagi sesuai prediksi para ahli kesehatan, maka Pemkab Bogor dengan persetujuan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat akan mengetatkan aturan PPKM jelang perayaan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Pasca PPKM turun ke level 2, kita akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tapi, bukan berarti kita akan melonggarkan aturan PPKM ataupun protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, karena kita juga ingin terhindar dari ledakan gelombang ketiga Covid-19," tutur Ade Yasin.

Lonjakan Wisatawan Saat Nataru

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang menyiapkan strategi untuk mencegah terjadinya lonjakan wisatawan saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

"Jangan sampai ada kerumunan. Karena diprediksi ada gelombang ketiga (penularan Covid-19). Maka saat Nataru harus diperketat. Kita sama-sama rem jangan banyak merayakan tahun baru. Ini sedang dibahas soal aturan-aturannya," ucap Ade Yasin.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu mengaku mengkhawatirkan mengenai gambar-gambar akan adanya gelombang ketiga penularan Covid-19.

"Kalau kita (Kabupaten Bogor) masih PPKM Level 3, tentunya kebijakan masih ketat. Namun, daerah yang

sudah PPKM Level 2 ini kan sudah melonggar agar lebih hati-hati," kata Ade Yasin.

Menurutnya, Pemkab Bogor saat ini tengah mengkaji aturan yang akan diterapkan jelang dan selama Nataru, khususnya di kawasan-kawasan wisata di Kabupaten Bogor.

Pasalnya, Kabupaten Bogor masih menjadi destinasi wisata utama bagi masyarakat yang tinggal di Jabodetabek. Maka, pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah pencegahan agar tidak terjadi lonjakan wisatawan. Terlebih, kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor saat ini terus melandai dengan hanya penambahan empat kasus positif baru pada Sabtu (3/10). "Iya sudah melandai. Kemarin cuma empat kasus. Sehingga total yang saat ini terkonfirmasi positif dan menjalani isolasi hanya 41 orang," kata Ade Yasin. ● **gio**

Aset Pemkab Bogor Seluas 100 Ha di Tamansari Belum Bersertifikat

CIBINONG (IM)- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menyalahkan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) atas aset Pemkab Bogor seluas 100 hektare di Kecamatan Tamansari yang belum bersertifikat.

"Bidang pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) harus mencari alas hak atas aset Pemkab Bogor seluas 100 hektare di Kecamatan Tamansari, belum disertifikatkannya aset atau calon aset lahan itu merupakan kelalaian mereka," kata Usep kepada wartawan, kemarin.

Usep pun meminta peristiwa sengketa lahan dengan oknum masyarakat atau pihak swasta menjadi pembelajaran, dan jajarannya pun mendorong DPKPP, Dinas Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Kantor ATR/BNP Kabupaten Bogor untuk mensertifikatkan ribuan aset Pemkab Bogor.

"Kami terus dorong agar aset Pemkab Bogor segera disertifikatkan, tahun ini saja rencananya dari 3.000, 1.741 bidang aset Pemkab Bogor akan disertifikatkan. Dari tindakan serupa sebelumnya, aset Pemkab Bogor yang belum bersertifikat ada sekitar 500an bidang lagi," pinta politisi PPP ini.

Sebelumnya, Pemkab Bogor mengaku akan merapikan aset

lahan seluas 100 hektare di Kecamatan Tamansari. Saat ini lahan di kaki Gunung Halimun Salak Endah tersebut banyak dikuasai oleh oknum masyarakat, di mana di lokasi ada yang dibangun menjadi vila, rumah, vihara maupun bangunan lainnya. "Aset lahan seluas 100 hektare di Kecamatan Tamansari tersebut oleh Bupati Bogor sebelumnya tidak bisa mensertifikatkan, lalu kini baru 10 hektare yang sudah clear and clean. Kedepan, kami akan merapikan aset lahan tersebut," ucap Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bogor, Ade Yasin.

Ibu dua orang anak ini menambahkan aset lahan pemerintah daerah tersebut menjadi daya tarik oknum masyarakat, karena lokasinya yang bagus, di mana memiliki panorama yang indah.

Aset kita sebenarnya banyak, pemandangannya juga indah-indah hingga membuat oknum-oknum masyarakat tersebut tertarik mematok kepemilikannya di lahan tersebut. Saya pribadi, tidak berani karena kalau mereka lempar tongkat kayu jadi tanaman, kalau saya yang lempar tongkat kayu maka bisa jadi ular," tambahna.

Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto menjelaskan

untuk merapikan aset pemerintah daerah di Kecamatan Tamansari, jajarannya memiliki beberapa opsi. "Perapian aset Pemkab Bogor ini, akan dilakukan beberapa opsi hingga menjadi solusi. Opsi langkah ini akan dirumuskan baik aturan maupun lainnya oleh Tim investasi dan pemanfaatan batas GTRA Kabupaten Bogor hingga ada kepastian hukum buat semua pihak," jelas Eko.

Ya menjelaskan selain menguasai aset lahan tersebut secara utuh, opsi lainnya masyarakat akan diberikan waktu hingga beberapa lama untuk memanfaatkan bangunan di atasnya, lalu aset lahan tersebut akan kembali menjadi milik Pemkab Bogor. "Opsi lainnya, Pemkab Bogor akan memberikan uang kerahiman kepada masyarakat, luas aset lahan yang dikuasai oknum masyarakat akan dibagi dua, fasilitas umum atau sosial akan diberikan sebagian hak atas lahannya atau kita akan cari lagi opsi lainnya," jelasnya.

Ketua Harian Tim GTRA Kabupaten Bogor sekaligus Kepala Kantor ATR/BNP Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto melanjutkan walaupun konflik lahan antara Pemkab Bogor dengan oknum masyarakat ini terbilang kasus kecil, karena oknum tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam kepemilikan lahannya. ● **gio**

IDN/ANTARA



UNJUK RASA MENUNTUT PEMBUBARAN MENWA DI UNS

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menuntut Bubarkan Menwa dan Justice For Gilang di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (1/11). Dalam unjuk rasa tersebut mereka meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus meninggalnya mahasiswa Gilang Endi Saputra saat mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa (Menwa) Universitas Sebelas Maret (UNS) serta meminta pihak kampus membubarkan UKM Menwa.

Jalan Soleh Iskandar yang Ambles Ditutup untuk Roda Empat

BOGOR (IM)- Jalan Soleh Iskandar tepatnya di underpass Tol BORR, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, ambles dan akan ditutup untuk kendaraan roda empat atau lebih. Penutupan jalan itu rencananya dimulai Selasa (2/11).

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, penurunan jalan di lokasi sangat cepat. Untuk perbaikan sedianya baru bisa dilakukan awal 2022. "Penurunannya cepat sekali, harus ada tindakan cepat sudah direncanakan untuk pengerjaan tapi harus proses lelang. Lelang akan segera dimulai nanti awal tahun depan target mulai dikerjakan. Semuanya dari KemenPUPR," kata Bima di lokasi, Senin (1/11).

Untuk penanganan sementara, akan dilakukan penutupan jalan oleh Satlantas Polresta Bogor Kota mulai Selasa bagi kendaraan roda empat atau lebih. Sedangkan, roda dua masih diperbolehkan melintas. "Mulai besok (Selasa-Red) Insya Allah kepolisian akan menutup jalan ini tidak boleh dilewati roda empat, tapi motor boleh di pinggirnya saja. Jadi mobil tidak boleh (melintas) karena mengantisipasi terjadinya longsor apalagi sekarang intensitas curah hujan sedang sangat tinggi jadi kita perlu antisipasi," ungkap Bima.

Di sisi lain, Bima menyebut amblesnya ruas jalan nasional itu bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa dari usia atau faktor cuaca yang mempengaruhi jalan.

"Jadi kepada warga Bogor pengguna Jalan Soleh Iskandar ini untuk mengantisipasi akan kita tutup, hanya boleh untuk roda dua saja, untuk pengerjaannya Insya Allah tahun depan antara Februari-Maret setelah lelang selesai semua. Tapi desain dan perencanaan sudah ada semua. (Faktor) ya ini kan sudah lama, dibangun tahun 2005 sudah 15 tahun lebih mungkin juga faktor cuaca dan lain-lain," ucapnya. Sementara itu, Kasatlantas Polresta Bogor Kota, AKP Galih Apria mengatakan, jalan ini termasuk sangat padat dilalui kendaraan. "Jalan ini termasuk jalan nasional yang volume kendaraan cukup besar. Saya dapat info pengerjaan ini akan dimulai Januari jadi sementara rekayasa yang bisa melewati jalan ini hanya roda dua," ucap Galih.

Penutupan ini sedianya dimulai besok hingga pengerjaan perbaikan jalan mulai dilakukan. Setelahnya, akan ada penutupan jalan secara total sampai perbaikan selesai dengan estimasi 6 bulan. ● **gio**



IDN/ANTARA

PUNCAK PERINGATAN MAULID NABI DI BANTEN

Panitia membagikan paket sembako hasil penghimpunan sedekah kepada warga pada puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tanggul, Lopang, Serang, Banten, Senin (1/11). Puncak peringatan kelahiran atau Maulid Nabi yang berlangsung setiap bulan Mulud pada penanggalan Jawa tersebut ditandai dengan mengumpulkan barang-barang sedekah kemudian membagikannya kepada warga yang membutuhkan.